

Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam Program Wajib Belajar Sembilan Tahun di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro

Jhon. H . Riangkamang
Masje. S Pangkey
Very Y. Londa

Abstract: Education is a key to reducing poverty in the medium and long term and one of the most important elements in national development, because with education for the community to be promising people more advanced in his thinking. Thought developed societies to form a Human Resources (HR) of high quality. in the District of Siau Tagulandang Biaro of school age who have not been able to get an education, in junior high school education who do not finish school amounted to 51 students from the data taken at the Department of Education Youth and Sports District Siau Tagulandang Biaro. The cause of the children who dropped out of school As well as some elementary school and junior high school in the district of Siau Tagulandang Biaro still not being prasyarat terselenggaraya education among others damaged classrooms and the uneven ketersebaran teachers is a problem facing education in the District Siau Tagulandang Biaro. Conditions as described previously prompted the authors to determine the depth on the performance of the Department of Education, Youth and Sports District Siau Tagulandang Biaro in implementing the nine-year compulsory education program. From the results of research and analysis concluded that the Performance Department of Education Youth and Sport in the Nine-Year Compulsory Education Program which terlihat on five aspects, namely. Productivity, quality of service, responsiveness, responsibility and accountability. Of the five aspects of the new aspects that have good responsiveness in responding to community needs its citizens basic education, especially primary school dropouts and facilitate the higher education level, and an increase in APM elementary and junior high school through the nine-year compulsory education program

Keywords: *Performance, Organizational Performance, nine-year compulsory education*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang dan salah satu unsur terpenting dalam pembangunan nasional, karena dengan adanya pendidikan bagi masyarakat akan menjanjikan masyarakat lebih maju dalam pemikirannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Wajib Belajar. yaitu peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar, pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Selanjutnya pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan dan didalam ayat (3) warga negara Indonesia yang berusia diatas 15 tahun dan belum lulus

pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya pemerintah dan pemerintahan daerah. Dari undang-undang di atas sudah jelas bahwa warga negara berhak mendapatkan atau memperoleh pendidikan yang dilindungi oleh undang-undang.

Adapun data awal yang diperoleh data anak yang bersekolah di sekolah dasar (SD) = 6730 siswa dan sekolah menengah pertama berjumlah = 3239 siswa, jumlah guru atau pendidik = 1,176 orang dan jumlah sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) = 128. Pada kenyataan masih adanya anak-anak di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro pada usia sekolah yang belum dapat mengenyam pendidikan, di jenjang pendidikan SMP yang tidak menyelesaikan sekolahnya berjumlah 51 siswa dari data yang diambil di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Penyebab anak anak yang mengalami putus sekolah tersebut karena malas pergi ke sekolah dan sudah terbawa dengan pergaulan yang buruk. Adapun juga beberapa sekolah di

SD dan SMP di wilayah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro masih kurang yang menjadi prasyarat terselenggaranya pendidikan antara lain ruang kelas yang rusak dan tidak meratanya ketersebaran tenaga guru merupakan permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro.

Perhatian pemerintah dan masyarakat, harus diarahkan untuk mengatasi adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab siswa yang lulus SD tidak mampu melanjutkan ke SMP atau anak terpaksa tidak dapat melanjutkan pendidikan (drop-out). Kondisi ini tidak lepas dari peran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro dalam ikut serta memfasilitasi adanya anak-anak yang drop-out atau tidak bisa melanjutkan sekolah meskipun hanya sampai di tingkat dasar (SD-SMP), dengan menyelenggarakan pendidikan kejar paket A atau fasilitas lainnya.

Oleh karena itu, tuntutan terhadap terjaminnya perbaikan kinerja di dunia pendidikan disinilah letak peran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siau Tagulandang Biaro dalam upaya penyelenggaraan program wajib belajar sembilan tahun. Mangkunegara (2001:91), mengatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan kepadanya.

Menurut Dwiyanto, (2002), ukuran kinerja organisasi publik dimata para stakeholder juga berbeda-beda, Namun, ada beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik yaitu: (1) produktivitas, (2) kualitas layanan, (3) responsivitas, (4) responsibilitas, (5) akuntabilitas.

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Wajib belajar ini merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Program ini mewajibkan setiap warga Negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 (sembilan) tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga

kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Wajib belajar ini sasarannya adalah setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun. Artinya setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dengan mengikuti program wajib belajar. Sementara pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Sebab wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Kegiatan yang ada dalam program wajib belajar sembilan tahun meliputi: (1) Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa SD dan SMP, (2) pengadaan sarana dan prasarana sekolah, (3) pengadaan alat praktek dan peraga, (4) penyediaan Bantuan Operasional Sekolah, (5) penyelenggaraan Paket A dan Paket B.

Kondisi sebagaimana diuraikan sebelumnya mendorong penulis untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siau Tagulandang Biaro dalam melaksanakan program wajib belajar sembilan tahun.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain yang dipakai dalam penelitian ini adalah desain kualitatif. Desain kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, kompherensif, dan holistic. Menurut Strauus dan Corbin (1997), yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat

digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial.

Sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk menjawab Bagaimana Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam Program Wajib Belajar Sembilan Tahun di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, maka fokus penelitian adalah:

1. Produktivitas
2. Kualitas Layanan,
3. Responsivitas,
4. Responsibilitas,
5. Akuntabilitas,

Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Pemilihan lokasi ini dengan alasan bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siau Tagulandang Biaro terdapat cukup banyak data yang penulis butuhkan untuk penelitian ini. Disamping itu penulis telah mendapat ijin untuk melakukan penelitian guna menyusun skripsi pada kantor tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen.

Data penelitian ini diperoleh dari informan kunci internal di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Adapun informan dalam penelitian ini adalah 12 orang.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

- 1) Observasi: biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak terhadap objek penelitian (Nawawi, 1995: 100). Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan.
- 2) Wawancara: adalah teknik untuk mendapatkan data dengan cara melakukan tanya jawab berdasar pedoman yang telah disusun sebelumnya (Moleong, 1994: 135). Teknik wawancara yang dilakukan penulis tidak bersifat formal dan struktur yang kuat, agar informasi yang diperoleh

lebih mendalam. Penulis membuat panduan wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam interview guide. Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai tujuan penelitian ini.

- 3) Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan pencatatan dan penganalisisan atas data-data yang telah ada dalam dokumen, baik yang berupa laporan maupun dokumen-dokumen lain yang mendukung dan relevan dengan penelitian ini.

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deksriptif sehingga setelah dataterkumpul, analisa yang dilakukan adalah analisa kualitatif. Menurut Sutopo (2006: 87 – 88) analisis data ialah : “Mendesripsikan beragam informasi (penggalan dan pengumpulan data) dilapangan yang meliputi: catatan wawancara, catatan observasi, data resmi yang berupa dokumen/arsip, memoranda seseorang yang diteliti, memo yang dibuat peneliti, komentar pengamat”. Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Oleh sebab itu, untuk menampilkan data yang berserakan menjadi bentuk sajian data yang utuh, menarik, penuh makna, runtut dan logis.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sutopo, 2006 : 128), terdapat tiga komponen pokok dalam menyusun penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu:

- 1) Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam reduksi penulis diharuskan memeriksa semua data yang diperoleh secara lengkap, runtut atau masih memerlukan informasi tambahan sebagai pelengkap dalam penyusunan nantinya. Melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada satu fokus, membuang hal-hal yang tidak diperlukan untuk mengatur data sehingga kesimpulan penelitian dapat dilakukan.
- 2) Penyajian data. Data yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat diketahui kejadian dan berupa kalimat-kalimat, cerita-cerita maupun tabel-tabel.

- 3) Penarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan hanyalah merupakan sebagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Pada bagian ini peneliti berusaha memberikan makna penuh dari data yang terkumpul dan telah diolah, sehingga membentuk satu sinopsis utuh yang menjelaskan pokok permasalahan dari awal hingga akhir dari seluruh rangkaian penelitian ini (Sutopo, 2002: 91-93).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Objek Penelitian

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang disingkat SITARO, adalah pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 berwenang mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Kewenangan kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan daerah otonom memiliki kewenangan otonom yang luas dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro mempunyai 25 (dua puluh lima) urusan wajib dan 9 (sembilan) urusan pilihan. Sejalan dengan amanat tersebut, Pendidikan sebagai urusan wajib yang pertama dalam PP tersebut. Maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro perlu membentuk Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

B. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun

Program wajib belajar 9 tahun merupakan suatu gerakan nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia bagi warga negara Indonesia yang berusia 7-15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan pendidikan

minimum yang berlaku untuk semua warganegara, tanpa kecuali. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan dasar berlangsung 9 tahun yaitu 6 tahun di sekolah dasar (SD) dan 3 tahun di Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat. Pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar diselenggarakan dengan memberikan pendidikan, meliputi penumbuhan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pembangunan watak dan kepribadian, serta pemberian pengetahuan dan ketrampilan dasar. Pendidikan dasar juga berusaha memberikan kesanggupan pada peserta didik bagi perkembangan kehidupannya, baik untuk pribadi atau masyarakat. Oleh karena itu, setiap warga negara harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan dasar. Program pendidikan dasar dapat diberikan melalui pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah.

Di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro lulusan SD sebanyak 1058 siswa dan lulusan SMP sebanyak 1029 siswa pada tahun 2015 data ini di ambil dari situs antaranews.com Adapun data awal yang diperoleh data anak yang bersekolah di sekolah dasar (SD) = 6730 siswa dan sekolah menengah pertama berjumlah = 3239 siswa, jumlah guru atau pendidik = 1,176 orang dan jumlah sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) = 128. Pada kenyataan masih adanya anak-anak di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro pada usia sekolah yang belum dapat mengenyam pendidikan, di jenjang pendidikan SMP yang tidak menyelesaikan sekolahnya berjumlah 51 siswa dari data yang diambil di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siau Tagulandang Biaro.

Penyebab anak-anak yang mengalami putus sekolah tersebut karena malas pergi ke sekolah dan sudah terbawa dengan pergaulan

yang buruk dan kesadaran orang tua pada beberapa wilayah untuk mendorong minat dan semangat anak dalam bersekolah masih kurang. Kelompok sasaran pada program dan kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada Tahun 2016, yaitu :1029 lulusan SMP di tahun 2015 sumber data dari antaranews.com, 1058 lulusan SD di tahun 2016

C. Pembahasan

Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam Program Wajib Belajar Sembilan Tahun di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro dikaji dengan menggunakan penerapan 5 indikator yang terdiri atas produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

1. Produktivitas

Konsep produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. (Dwiyanto 2002). Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam program wajib belajar Sembilan tahun dengan adanya kegiatan pokok yaitu pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa SD dan SMP , pengadaaan sarana dan pra sarana sekolah, penyediaan bantuan dana operasional sekolah dan pemerataan guru bersertifikasi. Data dokumentasi yang bersumber pada Renstra Dikpora 2014-2018 Jumlah ketersediaan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) untuk kurun waktu sekarang adalah 103 sekolah yang terdiri atas 102 SD (40 SD Negeri dan 62 SD Swasta) dan 1 MI Swasta. Meliputi 606 ruang kelas SD dan 6 ruang kelas MI, yang mampu menampung siswa sejumlah 7.586 orang. Ketersediaan guru yang mengajar sebanyak 798 orang. Adapun penduduk usia 7-12 th seluruhnya berjumlah 7.124 penduduk, sedangkan untuk paket A setara SD diikuti oleh 11 orang.

Kualitas sumber daya pendidikan di SD antara lain dapat dikemukakan, dari 798 guru yang mengajar di SD/MI telah dinyatakan layak mengajar sebanyak 21.06%, semi layak 50.22% dan tidak layak untuk mengajar sebanyak 28.72%. Jumlah SMP dan MTs yang saat ini tersedia 25 SMP (terdiri atas 23 SMP Negeri dan 2 SMP Swasta) dan 1 MTs, dengan jumlah ruang kelas untuk SMP

sebanyak 153 ruang, dan 3 ruang kelas MTs. Sedangkan keseluruhan jumlah murid sebanyak 3.798 siswa yang terbagi untuk siswa SMP sejumlah 3.761 siswa, dan 37 siswa MTs. Jumlah penduduk usia sekolah 13 – 15 tahun adalah 3.413 orang.

Kualitas sumber daya pendidikan di SMP, keseluruhan guru yang mengajar di SMP dan MTs sebanyak 378 orang. Dari seluruh guru yang mengajar di SMP dan MTs dapat dikategorikan guru layak mengajar sebanyak 66.78% guru semi layak mengajar 7.35% dan guru tidak layak mengajar 25.87%. Produktivitas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siau Tagulandang Biaro dalam program wajib belajar sembilan tahun belum bisa dikatakan optimal disebabkan tidak meratanya atau kurangnya guru yang bisa dikatakan layak mengajar di tingkat pendidikan SD dan SMP.

2. Kualitas layanan

Kualitas Layanan, Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. (Dwiyanto 2002). Kualitas layanan belum bisa dikatakan baik karena dalam pengembangan sarana dan prasarana sekolah yaitu masih ruang kelas yang rusak serta kurangnya tenaga pengajar yang memiliki kompetensi dan kreativitas dalam mengajar anak didik.

3. Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Dwiyanto 2002). Upaya Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan adanya program kejar paket B ini setara dengan jenjang pendidikan SMP. Anak-anak putus sekolah tidak kehilangan kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Strategi ini dikembangkan untuk mengurangi

jumlah anak putus sekolah pada jenjang pendidikan SMP yang masih cukup banyak terjadi di wilayah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro.

Tersedianya bantuan operasional sekolah (BOS) SD dan SMP yang sampai skarang masih berlanjut. Peningkatan minat, bakat dan kreatifitas siswa SD dan SMP dengan tolak ukur terlaksananya dan terpilihnya peserta olimpiade sains Nasional SD dan SMP, terlaksananya lomba cerdas cermat tingkat SD dan SMP, terlaksananya lomba sekolah sehat SD dan SMP. Upaya ini untuk mengembangkan kreatifitas siswa agar bisa bersaing di tingkat nasional.

Dengan upaya tersebut pemerintah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga telah memberi respon terhadap kebutuhan masyarakat akan pendidikan dasar warganya, terutama yang putus sekolah dasar dan memfasilitasi kepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, melalui program wajib belajar sembilan tahun.

4. Responsibilitas

Responsibilitas, menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas (Dwiyanto 2002).

Responsibilitas banyak digunakan dalam menilai kinerja organisasi publik. Responsibilitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintah dengan hukum atau peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Untuk bisa melaksanakan penilaian terhadap apa yang mejadi sikap, perilaku dan sepak terjang birokrasi publik, maka harus memiliki standar penilaian tersendiri yang sifatnya administratif atau teknis, bukan politis. Responsibilitas berhubungan dengan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan segala kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip dan peraturan yang benar dengan standart profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki dalam rangka pencapaian tujuan secara optimal.

Responsibilitas Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga dalam program wajib belajar sembilan tahun di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro adanya peningkatan APK dan APM SD/MI dan SMP/MTs tetapi masih ada anak yang putus sekolah di tingkat pendidikan SMP dan juga masih ada ruangan kelas yang rusak karena kurangnya dana dari pemerintah dalam tingkat pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siau Tagulandang Biaro belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan segala kegiatannya sesuai dengan prosedur atau SOP yang telah ditetapkan

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besarnya kebijakan dan kegiatan organisasi public tunduk pada para pejabat politik tersebut karena di pilih oleh rakyat (Dwiyanto 2002), dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat Akuntabilitas dapat disimpulkan sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan mengendalikan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan yang di percayakan. Program wajib belajar sembilan tahun yang mendasari pada Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Indonesia. Akuntabilitas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam program wajib belajar sembilan tahun di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro dengan adanya keberhasilan pencapaian aspek peningkatan mutu pendidikan dasar Peningkatan angka partisipasi murni (APM) di jenjang pendidikan SD dan SMP serta prestasi sekolah atau siswa di tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional sedangkan yang belum bisa di katakan berhasil ialah pengembangan sarana prasarana pendidikan dasar SD dan SMP, peningkatan mutu pendidik.

Dengan demikian, akuntabilitas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam program wajib belajar sembilan tahun merupakan bentuk pertanggungjawaban Dikpora Kabupaten Siau Tagulandang Biaro atas penyelenggara pelayanan wajib belajar Sembilan tahun seluruh pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta

pertanggungjawaban tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu tertuang didalam konstitusi negara Indonesia yaitu dalam UUD 1945 yang mengatakan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, artinya rakyat nyata-nyata memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban kepada pemerintah dalam hal pelaksanaan program wajib belajar Sembilan tahun.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga dalam Program Wajib Belajar Sembilan Tahun yakni terlihat pada 5 aspek yaitu. Produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Dari lima aspek tersebut baru aspek responsivitas yang sudah baik dalam memberi respon terhadap kebutuhan masyarakat akan pendidikan dasar warganya, terutama yang putus sekolah dasar dan memfasilitasi kepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan APM siswa SD dan SMP melalui program wajib belajar sembilan tahun.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, sebagai berikut: Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga diharapkan dalam produktivitas, responsibilitas, akuntabilitas, kualitas layanan penyediaan sarana dan prasarana harus merata di setiap wilayah di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro serta memperbanyak jumlah pendidik dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga harus lebih mengupayakan agar anak-anak putus sekolah tidak kehilangan kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto Agus, 2002. *Reformasi Birokrasi Public Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit PSKK-UGM
- Fuad Ishan, *Dasar-Dasar Kependidikan* (Jakarta : Rineka Cipta, 1996)
- Fuad. Ihs 1995. *Dasar-dasar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta

- H.B Sutopo. 2002, *metologi penelitian kualitatif*, Surakarta : UNS PRESS.
- Hessel Nogi. S.T 2005. *Manajemen Publik Jakarta* : PT. Grasindo
- Mangkunegara A.P. 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rosdakarya
- Nawawi, Hadari, 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Ugm Press. Yogyakarta.
- Sutopo. 2006. *Metodolog Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS.
- Strauus, A. dan Corbin, J. 2009. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sumber Lainnya:

- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar
- Profil Kabupaten Sitaro
- Renstra Dikpora Sitaro 2014-2018
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Imadikus.com/penyebab-anak-anak-putus-sekolah-dan-cara-penanggulangannya/Wajib Belajar 9 Tahun <https://lib.atmajaya.ac.id>
- Konsep Pendidikan <https://nie07independent.wordpress.com/konsep-pendidikan/>
- Pengertian dan tujuan pendidikan <https://disdik.bekasikab.go.id>
- Dikpora sitaro <https://dikpora.sitarokab.go.id>